

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengupayakan Pembangunan pada masyarakat, muncul teori yang memuat potensi-potensi baru yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, yaitu teori Pembangunan Berpusat pada Rakyat (People Centered Development) yang dicetuskan oleh Korten yang menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia.¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk implementasi pembangunan yang ditujukan agar menciptakan masyarakat yang berdaya serta aktif berkontribusi dalam membangun daerahnya. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dimaksudkan sebagai suatu upaya yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial berkelanjutan.²

Penelitian kali ini akan mengacu kepada Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian artinya yang menjadi kajian pemberdayaan masyarakat disini adalah petani, yang mana Petani tentunya memiliki peran penting dalam kontribusinya di bidang

¹ Totok Mardikanto, M.S, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, ALFABETA, Bandung, 2015, hlm 122

² Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah *CIVIS*, vol 2(1), 2015, hlm 88

pertanian khususnya bagi daerah tempat tinggalnya, melalui aktivitas dan kegiatan usaha tani yang dilakukan terutama terhadap lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk dapat ditanami tanaman yang menghasilkan.

Bidang pertanian memiliki kontribusi besar bagi Indonesia, diantaranya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara, Selain itu Indonesia sendiri juga dijuluki sebagai negara agraris, dimana pada umumnya hampir diseluruh daerah di Indonesia, masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Berdasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa petani merupakan salah satu sumber SDM terbesar bagi Indonesia, dan tentu potensi SDM yang dimiliki ini perlu diberdayakan sebaik mungkin agar Petani mampu berkontribusi besar terhadap kemajuan dan perkembangan pertanian di Indonesia.³

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan kelembagaan petani.⁴

³ Dedi Rustiono, Pemberdayaan Petani Oleh Penyuluh Untuk Pembangunan Usaha Tani Padi Organik di Desa Pondok, Kecamatan Nguter, kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah , Tesis, hlm 2.

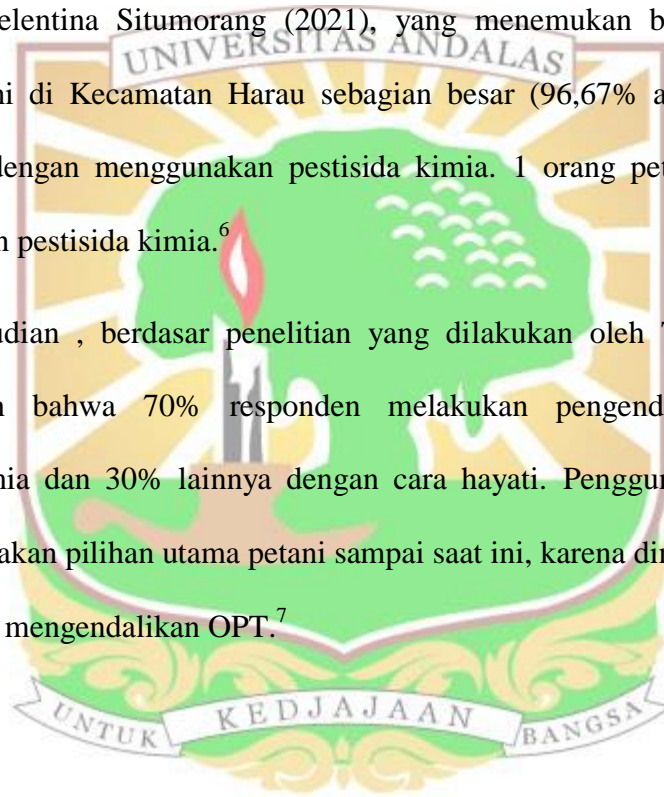
⁴ Jogloabang, UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2013-perlindungan-pemberdayaan-petani?amp>, diakses pada 28 Maret 2022 PKL 11:25 WIB

Suatu hal yang sudah sewajarnya apabila Indonesia dalam pembangunannya menjadikan pertanian sebagai prioritas utama, hal ini dibuktikan dengan banyaknya program program dibidang pertanian yang diberlakukan diantaranya pensubsidian pupuk dan benih unggul, bantuan alat mesin pertanian, pola tanam jajar legowo, perbaikan irigasi, perlindungan harga petani dimana , pengembangan kawasan rumah pangan lestari, auransi usaha tani, Bimas, dan masih banyak lagi. Memang arah program tersebut sangatlah bagus, namun kebanyakan program tersebut terlalu terfokus kepada perlindungan terhadap petani (ekonomi dan sosial). Dilain sisi, ada hal krusial lainnya dalam bidang pertanian yang luput dari perhatian yang berdampak buruk terhadap ekologi, yang imbasnya nanti berdampak negatif bagi pembangunan berkelanjutan, seperti diantaranya menurunnya produktivitas tanah, rusaknya keseimbangan ekosistem, matinya spesies lain selain hama penyakit tanaman, timbulnya bahaya yang mengancam lingkungan yang mana apabila dibiarkan dalam jangka panjang akan beresiko terhadap kesehatan manusia, dampak-dampak negatif tersebut tidak lain disebabkan oleh ketidakpahaman para petani dalam penggunaan pupuk anorganik serta pestisida kimia yang memang ditujukan sebagai suplemen agar mendapatkan hasil yang cepat dan mudah dalam pengaplikasiaanya (instan), sehingga secara tidak disengaja penggunaannya menjadi meningkat dan berbahaya, hal ini menunjukkan rendahnya wawasan dan pengetahuan para petani terhadap pemeliharaan dan pengendalian tanaman. Guna menghindari dampak-dampak negatif tersebut, perlu adanya pemberdayaan terhadap petani guna mengedukasi petani terkait masalah tersebut, sehingga perlu adanya prioritas pada program yang menyangkut

pemberdayaan terhadap petani. Terutama pemberdayaan terhadap bagaimana pemeliharaan tanaman serta penanggulangan OPT secara tepat yang ramah lingkungan, sehingga pilar dalam pembangunan berkelanjutan dapat berjalan seutuhnya. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sendiri merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam atau lingkungan.⁵

Tingginya penggunaan pestisida kimia pada petani, juga dibuktikan pada hasil penelitian Helentina Situmorang (2021), yang menemukan bahwa dari beberapa sampel petani di Kecamatan Harau sebagian besar (96,67% atau 29 orang petani responden) dengan menggunakan pestisida kimia. 1 orang petani responden tidak menggunakan pestisida kimia.⁶

Kemudian, berdasar penelitian yang dilakukan oleh Tri satyani (2019), menunjukkan bahwa 70% responden melakukan pengendalian menggunakan pestisida kimia dan 30% lainnya dengan cara hayati. Penggunaan pestisida kimia masih merupakan pilihan utama petani sampai saat ini, karena dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengendalikan OPT.⁷



⁵ Mira Rosana, "Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia." Kelola: Jurnal Sosial Politik 1.1 (2018), hlm 149.

⁶ Helentina Situmorang, "Perilaku Petani Padi Sawah Dalam Menggunakan Pestisida Kimia di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Agricultural Journal. 4(3). (2021). Hlm 420.

⁷ Satyani, T., Arfan, A., & Sayani, S "Evaluasi Penggunaan Pestisida Pada Petani Bawang Merah Di Desa Wombo Mpanau Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala". Jurnal Agrotech, 9(1), 26-32. (2019). Hlm

Penggunaan pestisida (kimia) menjadi cara yang paling banyak digunakan oleh para petani dalam pengendalian hama. Tingginya tingkat penggunaan pestisida ini didasari oleh;

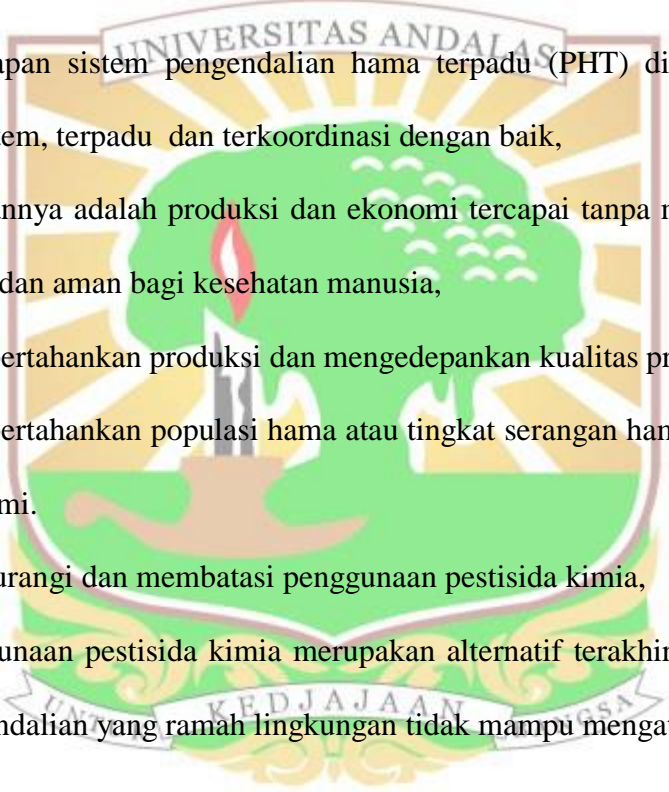
1. Dapat diaplikasikan dengan mudah,
2. Dapat diaplikasikan hampir disetiap waktu dan setiap tempat,
3. Hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat,
4. Dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dan dalam waktu relatif singkat, dan
5. Mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek.⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa pestisida merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian, terutama pangan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pestisida juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dari kemudahan dan keuntungan sesaat yang diterima dari pengaplikasian pestisida, tentunya hal ini berdampak negatif terhadap petani, lingkungan, tanaman dan masyarakat sebagai konsumen produk pertanian. Penggunaan pestisida yang dilakukan petani mengakibatkan keracunan bagi petani, residu pestisida mengendap dalam tanah serta pestisida yang disemprotkan pada tanaman diserap melalui daun, batang dan akar tanaman.⁹

⁸ Sari, N, Fatchiya, A. Tjitropranoto, P. Tingkat Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Sayuran di Kenagarian Koto Tinggi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jurnal Penyuluhan. 2016. Hlm15.

⁹Sari, N, Fatchiya, Prabowo Tjittopranoto. Op.cit hlm 16.

Guna menjawab permasalahan terkait tingginya penggunaan pestisida dalam penanggulangan OPT oleh para petani, sejak lebih 20 tahun yang lalu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menerapkan konsep pengendalian hama terpadu (PHT) dalam sistem pertanian, yang bertujuan dalam mengedukasi petani agar lebih berdaya dan berwawasan terutama dalam pengendalian hama terpadu.¹⁰ Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sendiri lebih mengedepankan pada pembangunan berkelanjutan, dapat dilihat dari ciri-ciri konsep PHT itu sendiri, yang diantaranya;¹¹

- 
1. Penerapan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) dilakukan secara bersistem, terpadu dan terkoordinasi dengan baik,
 2. Sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia,
 3. Mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian,
 4. Mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama dibawah ambang ekonomi.
 5. Mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia,
 6. Penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasi.

¹⁰ Muainah Hasibuan, Kajian Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Petani Padi Di KabupatenTapanuli Selatan, 2008.

¹¹ BPTP Maluku, Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), <https://maluku.litbang.pertanian.go.id/?p=7727>, diakses pada 2 Juni 2022 Pkl 10:15 WIB

Dari ciri-ciri diatas, dapat terbukti bahwa, konsep PHT mencerminkan pengendalian hama yang ramah lingkungan serta juga mempunyai sasaran terhadap sosial dan ekonomi.

Dalam menjawab aturan dasar tersebut, melalui Undang - Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, serta ditegaskan kembali melalui surat keputusan Menteri Pertanian Nomor: 390/Kpts/TP.600/5/1994 tentang penyelenggaraan program nasional pengendalian hama terpadu (PHT), pelaksanaan PHT sebagai dasar kebijaksanaan perlindungan tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1995 Tentang perlindungan Tanaman , maka direalisasikan kebijakan PHT, melalui program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang dibiayai Program Nasional PHT. Program SLPHT sendiri merupakan salah satu wadah pemberdayaan petani melalui metode partisipatoris untuk melatih petani terutama dalam meningkatkan kemampuan petani terkait PHT seperti meningkatkan pengetahuan bertani, menurunkan intensitas serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), menurunkan frekuensi penggunaan pestisida kimia, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Pelaksanaan program SLPHT juga menghasilkan petani-petani maju yang menjadi pionir atau pelopor tumbuh kembangnya kelembagaan PHT di masyarakat.¹²

¹² Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Penerapan PHT Skala Luas Serealia, Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Jakarta, 2018, hlm 2. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 Pkl 13:15 WIB.

Capaian pada program SLPHT memberikan dampak yang positif bagi bidang pertanian khususnya bagi para petani, namun dalam hal ini, program SLPHT dirasa masih perlu untuk dikembangkan terutama dalam sasaran tujuan yang lebih besar yang memberikan dampak yang signifikan tidak hanya terhadap peningkatan hasil panen namun juga pelayanaan terhadap petani sebagai agen dalam pemberdayaan.

Direktorat Jendral Tanaman Pangan mencoba menindaklanjuti terkait upaya pengembangan pada program SLPHT dengan kegiatan yang mampu memberikan jawaban terhadap pengembangan yang diinginkan melalui Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT). Berdasar Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor:135/Hk.310/C/12/2018 tentang Pengamanan areal tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) TA 2019, , dilaksanakan melalui berbagai kegiatan perlindungan tanaman pangan, diantaranya ;¹³

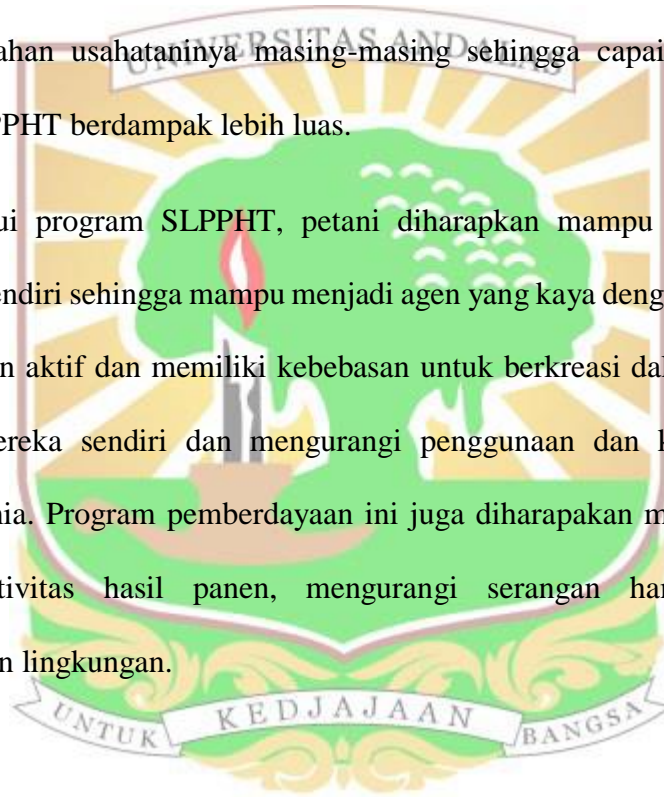
- a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
- b. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)
- c. Gerakan Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (Gerdal OPT)
- d. Penguatan Agroekosistem
- e. Demonstrasi Area (Dem Area)

Dalam mewujudkan kegiatan perlindungan terhadap tanaman pangan pada

¹³ Keputusan Direktorat Jenderal Tanamn Pangan No 135/Hk.310/C/12/2018.

nomor 1 yaitu Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) yang pelaksanaannya dibungkus dengan program SLPPHT (Sekolah Lapang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu), dimana pada program ini, para petani yang pada awalnya hanya berperan sebagai objek pemberdayaan, pada program kali ini di plot sebagai subjek pada pemberdayaan, melalui petani alumni SLPHT yang diperankan sebagai petani pengamat dalam pelaksanaan program, para petani pengamat didayagunakan untuk mengamati serta memandu petani peserta dalam penerapan konsep dan prinsip PHT di lahan usahatannya, kemudian para petani peserta diarahkan agar menerapkan prinsip PHT pada lahan usahatannya masing-masing sehingga capaian dan output pada program SLPPHT berdampak lebih luas.

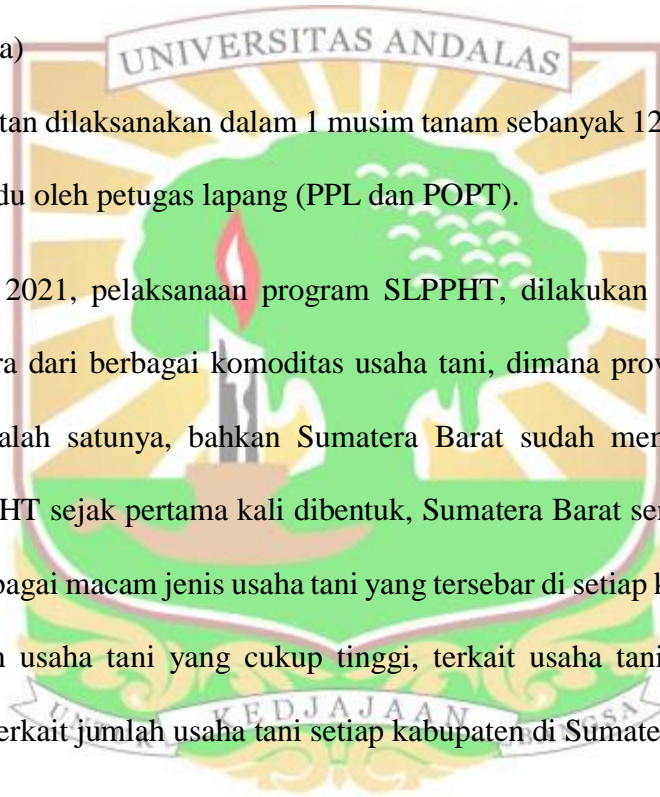
Melalui program SLPPHT, petani diharapkan mampu menjadi petani ahli dilahannya sendiri sehingga mampu menjadi agen yang kaya dengan pengetahuan lokal yang berperan aktif dan memiliki kebebasan untuk berkreasi dalam mengelola lahan pertanian mereka sendiri dan mengurangi penggunaan dan ketergantungan pada pestisida kimia. Program pemberdayaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan dan produktivitas hasil panen, mengurangi serangan hama, serta menjaga keseimbangan lingkungan.



Ketentuan dalam pelaksanaan SLPPHT sendiri yaitu:

1. Dilakukan pada luas hamparan minimal 25 Ha, yang dibagi menjadi 5 sub hamparan, dalam hamparan tersebut terdapat 1 petak hamparan, sebagai lahan studi petani sekaligus percontohan penerapan teknologi PHT.
2. Peserta terdiri dari 15 petani yang dibagi menjadi 5 sub kelompok, yang tiap sub kelompok terdiri dari 3 orang (1 dari petani alumni SLPHT dan 2 dari petani peserta)
3. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 musim tanam sebanyak 12 kali pertemuan yang dipandu oleh petugas lapang (PPL dan POPT).

Di tahun 2021, pelaksanaan program SLPPHT, dilakukan di 31 Provinsi yang menjadi sentra dari berbagai komoditas usaha tani, dimana provinsi Sumatera Barat merupakan salah satunya, bahkan Sumatera Barat sudah menjadi prioritas dalam kegiatan SLPHT sejak pertama kali dibentuk, Sumatera Barat sendiri dapat dikatakan memiliki berbagai macam jenis usaha tani yang tersebar di setiap kabupatennya dengan angka jumlah usaha tani yang cukup tinggi, terkait usaha tani di Sumatera Barat, berikut data terkait jumlah usaha tani setiap kabupaten di Sumatera Barat;



Tabel 1.1
Jumlah Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Produktivitas (Kuintal/Hektar)
1	Kota Bukittinggi	69,32
2	Kota Padang Panjang	62,91
3	Kota Solok	58,72
4	Kab. Tanah Datar	54,17
5	Kota Sawahlunto	52,63
6	Kab. Solok	51,40
7	Kab. Agam	50,43
8	Kota Padang	50,02
9	Kota Payakumbuh	48,86
10	Kab. Dharmasraya	48,36
11	Kab. Pesisir Selatan	48,01
12	Kab. Pasaman Barat	47,40
13	Kota Pariaman	47,11
14	Kab. Pasaman	45,93
15	Kab. Padang Pariaman	45,37
16	Kab. 50 Kota	43,99
17	Kab. Solok Selatan	40,07
18	Kab. Sijunjung	36,67
19	Kab. Kepulauan Mentawai	24,97
	Rata-rata	48,36

Sumber: BPS 2021

Program SLPPHT tahun 2021 di Sumatera Barat pada komoditas padi sawah dilaksanakan di beberapa kabupaten yang menjadi sentra padi, diantaranya yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Sijunjung. Ke-5 Kabupaten tersebut dipilih sebagai lokasi Pelaksanaan SLPPHT (Sekolah Lapang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu) dengan diwakili oleh salah satu nagari di masing-masing kabupaten. Pada penelitian ini peneliti memilih kabupaten Sijunjung sebagai studi kasus, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu;

1. Berdasar tabel 1.1 diketahui bahwa, Kabupaten Sijunjung memiliki Produktivitas hasil padi terendah dibanding kabupaten lain yang menjadi tempat pelaksanaan SLPPHT padi di Sumatera Barat tahun 2021 (Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman), bahkan terendah ke-2 di Sumatera Barat, artinya dengan rendahnya produktivitas padi di kabupaten Sijunjung, hal ini menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk melihat bagaimana pelaksanaan program SLPPHT di Kabupaten Sijunjung, melalui program SLPPHT ini, dapat diharapkan ini menjadi kesempatan bagi Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan kualitas SDM petani, dimana petani inilah yang nantinya menjadi potensi dalam pertumbuhan pada bidang pertanian di Kabupaten Sijunjung, dengan pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program SLPPHT, dapat diharapkan berhasil dilakukan dan nantinya akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas padi bagi Kabupaten Sijunjung.

2. Masih rendahnya penerapan PHT di Kabupaten Sijunjung, khususnya di Nagari Muaro Bodi yang menjadi Nagari tempat pelaksanaan program SLPPHT pada 2021 di Kabupaten Sijunjung, seperti masih tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida, permasalahan ini sangat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, khususnya bagi para petani di Nagari Muaro Bodi.

“...para petani lebih memilih mengeluarkan biaya lebih untuk pestisida kimia ketimbang membuat pestisida nabati, karna pestisida kimia memberikan hasil yang instan kepada usaha tani, hanya dengan biaya kurang lebih Rp 200.000, petani sudah dapat paket komplit pestisida kimia yang siap digunakan pada lahan usaha tani”. (Wawancara pribadi dengan Petugas Penyuluh (PPL) SLPPHT, Pemiriza Amd pada tanggal 12 November 2021 Pukul 14:25 WIB).

Serta permasalahan lainnya seperti Petani masih belum mengetahui teknik pengendalian OPT berdasar prinsip PHT, seperti budidaya tanaman sehat, dan pemanfaatan musuh alami, yang bermanfaat bagi terjaganya lingkungan yang lebih ramah.

Terkait alokasi anggaran pada pelaksanaan program SLPPHT berdasar pada Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 264 /HK.310/C/ 11/2021, menjelaskan bahwa pelaksanaan SLPPHT merupakan bagian tugas dari daerah (dekonsentrasi) yang artinya tanggung jawab diberikan pada OPD terkait di tingkat provinsi yaitu kepada UPTD BTPH Sumatera Barat, dimana anggaran didistribusikan melalui transfer uang ke rekening kelompok tani/gapoktan di Nagari Muaro Bodi yang menjadi peserta pada program ini, dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk pelaksanaan program SLPPHT seperti pembelian alat dan/ bahan pendukung penerapan PHT.

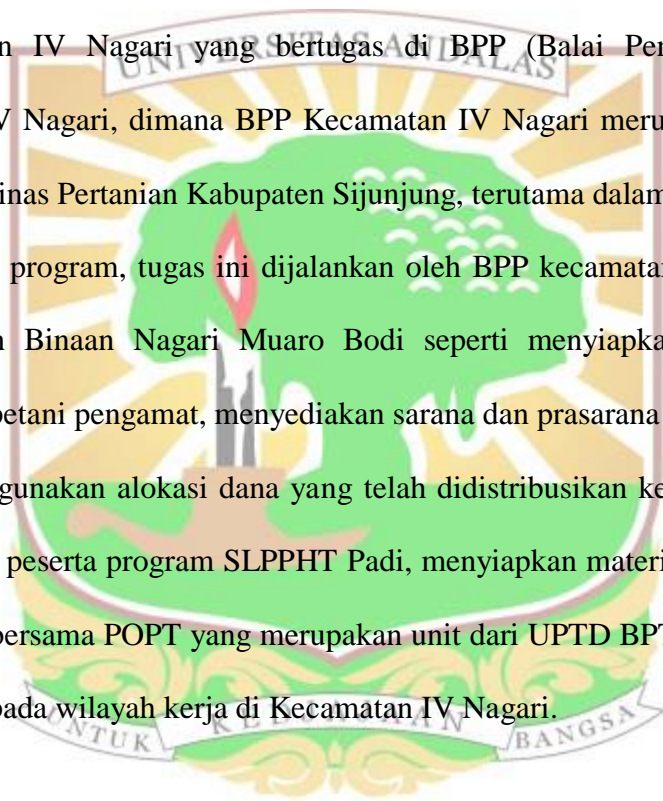
Sebagai pelaksana dan penanggung jawab terlaksananya program SLPPHT padi di Sumatera Barat, UPTD BTPH menyelenggarakan pelaksanaan program SLPPHT berdasar petunjuk teknis yang termaktub pada Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 264/HK.310/C/11/2021, yang dalam pelaksanaan programnya menjalankan fungsi dan Tugas yaitu;

1. Menetapkan tim pelaksana yang berkoordinasi dengan unit POPT yang ada di Kabupaten, salah satunya Kabupaten Sijunjung
2. Ikut dalam tahapan persiapan pelaksanaan program, seperti Pengsosialisasian dan Pembinaan terhadap kelompok tani sebagai calon peserta di Nagari Muaro Bodi.
3. Melaksanakan fungsi Monitoring dan Evaluasi terhadap program.
4. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kepada Direktorat jenderal perlindungan tanaman pangan.

Selanjutnya pada tingkat kabupaten, berdasar pada Keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 264/HK.310/C/ 11/2021 yang berisi terkait petunjuk teknis pelaksanaan program, UPTD BTPH melakukan koordinasi dengan Unit bawahannya yang diperbantukan di setiap kabupaten, yaitu unit POPT yang ada di Kabupaten Sijunjung, dimana tugas Unit POPT di Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu aktor pelaksana yaitu;

1. Terlibat dalam tahapan persiapan program SLPPHT Padi, seperti mempersiapkan lokasi dan calon peserta SLPPHT dengan berkoordinasi bersama unit POPT yang berada di wilayah kerja tingkat Kecamatan.
2. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kepada UPTD BTPH Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tugas nomor 1 yaitu dalam mempersiapkan terlaksanya program, Unit POPT Kabupaten Sijunjung, berkoordinasi dengan Unit POPT yang ada di Kecamatan IV Nagari yang bertugas di BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan IV Nagari, dimana BPP Kecamatan IV Nagari merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, terutama dalam tugas memfasilitasi terlaksananya program, tugas ini dijalankan oleh BPP kecamatan IV Nagari melalui PPL Wilayah Binaan Nagari Muaro Bodi seperti menyiapkan peserta program, menyiapkan petani pengamat, menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dengan menggunakan alokasi dana yang telah didistribusikan kepada kelompok tani yang menjadi peserta program SLPPHT Padi, menyiapkan materi PHT, serta menjadi Narasumber bersama POPT yang merupakan unit dari UPTD BTPH Sumatera Barat yang berada pada wilayah kerja di Kecamatan IV Nagari.



Gambar 1.1 Pelaksanaan Program SLPPHT Nagari Muaro Bodi



Sumber: Olahan Peneliti 2021

Pelaksanaan program SLPPHT ini direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan yang diantaranya seperti ;

1. Pemberian materi kepada peserta terkait konsep dan prinsip PHT
2. Melakukan kegiatan latihan praktek terkait pemeliharaan tanaman dan penanggulangan hama yang ranah lingkungan seperti membuat pestisida nabati, membuat pupuk anorganik, pembuatan alat penanggulanagn OPT yang ramah lingkungan dan hemat biaya
3. Kegiatan pengamatan rutin oleh para petani peserta pada lahan usaha tani mereka yang telah menerapkan prinsip PHT bersamaan dengan pelaksanaan program

Pelaksanaan Program SLPPHT Padi di Nagari Muaro Bodi tahun 2021 sendiri diikuti oleh 15 orang peserta, peserta sendiri merupakan perwakilan dari berbagai kelompok tani yang sudah ditunjuk berdasar musyawarah kelompok taninya masing-masing, berikut data terkait peserta.

Tabel 1.2 Daftar Nama Petani Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPPHT) Padi di Nagari Muaro Bodi Tahun 2021

No	N a m a	JenisKelamin (L/K)	Umur (Thn)	Pernah Ikut SLPH T (Ya/Belum)	Tingkat Pendidikan	Luas Sawah(ha)	StatusKepemilikan Sawah	
							Pem ilik Penggar ap	Penggar ap
1	Saadluddin	L	47	Ya	SLT A	0.25		√
2	Darm ainis	P	61	Ya	SLT A	0.25	√	
3	Teti Roslita	P	49	Ya	SLT A	1	√	
4	Epridaw ati	P	48	Ya	SLT A	0.5	√	
5	Hefni Novari	P	33	Belum	S1	0.25	√	
6	Maijusrita	P	40	Belum	SLT A	0.25	√	
7	Taufik Hidayat	L	26	Ya	SLT A	0.5	√	
8	Nasbir	L	61	Belum	SLT A	0.5	√	
9	Ahmad sariman	L	52	Ya	SLT P	1		√
10	Neri Eka	L	44	Belum	SLT A	1		√
11	Nuzirwan	L	44	Belum	SLT P	1.5		√
12	Hadi Warman	L	48	Belum	SLTA	1	√	
13	Yusnimar	P	62	Belum	SLTA	1	√	
14	Ledon	L	50	Belum	SLTP	0.5	√	
15	Yulia Ananda	L	28	Belum	SLTP	0.25		√

Sumber: BPP Kec IV Nagari 2021

Berdasar pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat 15 petani yang menjadi Peserta SLPPHT, ada sebanyak 5 orang yang akan berperan sebagai Petani Pengamat, Petani Pengamat ditentukan dari masing masing perwakilan kelompok tani yang telah dipilih berdasar hasil perembukan antara kelompok tani di Nagari Muaro Bodi bersama petugas pendamping yaitu PPL dan POPT, petani pengamat sendiri merupakan alumni dari peserta SLPHT yang pernah diikuti sebelumnya di Nagari Muaro Bodi, petani pengamat juga bisa dipilih berdasar keputusan petugas PPL dan POPT yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki petani, berikut daftar nama petani pengamat SLPPHT Nagari Muaro Bodi tahun 2021;

Tabel 1.3 Daftar Pengamat SLPPHT (Sekolah Lapang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu)

1	Nama	Taufik Hidayat	Neri Eka Warman	Susila Guswita	Teti Roslita	Ahmad Sariman
2	Umur (tahun)	26	44	46	49	52
3	Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Laki-Laki
4	Pendidikan Terakhir	SLTA	SLTA	SLTA	SLTA	SLTP
5	Agama	Islam	Islam	Islam	Islam	Islam
6	Pelatihan Yang Pernah Diikuti	SL-PHT	SL-PHT	SL-PHT	SL-PHT	SL-PHT

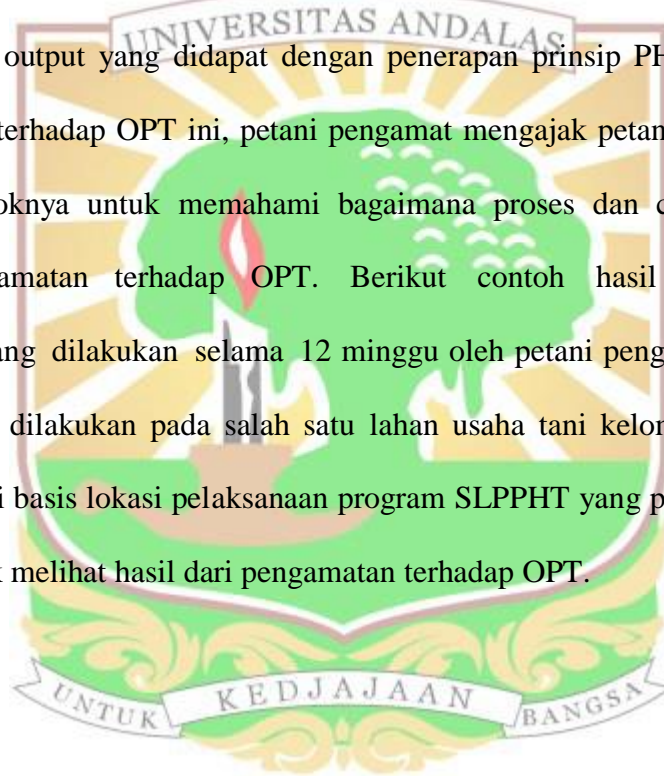
Sumber: BPP Kecamatan IV Nagari 2021

Petani pengamat berperan dalam membantu pendayagunaan terhadap petani lain yang menjadi peserta mengenai penerapan PHT pada lahan usaha tani kelompok taninya masing-masing, petani pengamat sendiri merupakan seorang yang memandu dan mengamati proses pengendalian dan pemeliharaan terhadap tanaman mulai dari awal persiapan tanam, hingga masa panen dan terus berlanjut, dengan menerapkan konsep dan prinsip PHT. Tujuan dari pemanfaatan petani pengamat adalah untuk meningkatkan dan menguatkan peran petani dalam penerapan konsep dan prinsip PHT di lahan usaha tani tempat pelaksanaan program, mendorong proses pemasyarakatan PHT ke petani lain, dan meningkatkan pengamanan produksi dan kualitas hasil pertanian.

Beberapa petani yang sudah menjadi alumni (pengamat) dan sedang menjalani program SLPPHT diketahui sudah mampu mempraktikkan pupuk berimbang, mengolah unsur-unsur biota alam lingkungan sekitar sebagai bahan pupuk organik, pilihan bibit, dan pola tanam, bahkan petani mengakui adanya peningkatan hasil panen dari eksperimen- eksperimen dilakukan peserta dan petani pengamat.

‘...Benar, saya sendiri merasakan dampak positif dari penerapan prinsip PHT, hasil panen pada lahan usaha tani saya cukup ada peningkatan dari sebelumnya yang masih menggunakan cara lama.’ (Wawancara dengan Petani Pengamat, Taufik Hidayat pada tanggal 17 Januari 2022 Pukul 14:00).

Petani pengamat dengan didampingi oleh petugas pendamping SLPPHT (POPT dan PPL) dalam menjalankan perannya sebagai pengamat pada lahan usaha tani di kelompoknya masing masing bertanggung jawab terhadap pengedukasian serta hasil pelaporan yang telah diamati selama proses dari awal tanam hingga panen para petani baik peserta maupun non peserta. Sesuai namanya, Petani pengamat bertugas dalam mengamati semua hal yang berkaitan dengan pengendalian dan pemeliharaan tanaman pada lahan usahatani kelompoknya, kegiatan Pengamatan ini ditujukan guna mempelajari output yang didapat dengan penerapan prinsip PHT, melalui kegiatan pengamatan terhadap OPT ini, petani pengamat mengajak petani lain di lahan usaha tani kelompoknya untuk memahami bagaimana proses dan cara yang dilakukan dalam pengamatan terhadap OPT. Berikut contoh hasil pengamatan OPT mingguan yang dilakukan selama 12 minggu oleh petani pengamat bersama petani peserta yang dilakukan pada salah satu lahan usaha tani kelompok Sopieng Indah yang menjadi basis lokasi pelaksanaan program SLPPHT yang peneliti ambil sebagai sampel untuk melihat hasil dari pengamatan terhadap OPT.



**Tabel 1.4 Hasil Pengamatan Mingguan OPT dan Musuh Alami pada
hamparan tani Sopieng Indah**

Peng. Minggu Ke	Rata- rata anakan (btg/rpn)	Jenis OPT						Musuh Alami			
		Intensitas Serangan (%)			Padat Populasi (ekor/rpn)			Padat Populasi(ekor/rpn)			
		PB	Tk		Ulat	Bll	Ws	Lb	Cp	Cocc i	Pae
I	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	14	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
III	22	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,2	-
IV	25	-	-	-	0,1	0,1	-	0,3	0,1	0,5	0,2
V	26	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3	0,3
VI	24	5	-	-	-	-	-	0,4	0,1	0,2	0,3
VII	23	5	2	-	-	0,1	-	0,3	-	0,2	0,5
VIII	23	3	5	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
IX	22	-	7	-	0,1	0,1	0,2	0,1	-	0,1	0,2
X	21	-	8	-	-	-	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
XI	20	-	10	-	-	-	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4
XII	20	-	10	-	-	-	0,1	0,2	-	0,1	0,2
Jumlah	249	13	42	-	0,3	0,3	0,8	2,6	0,6	2	2,2
Rata- Rata	20,75	1,0 8	3, 5	-	0,02 5	0,02 5	0,06 6	0,2 1	0,0 5	0,16	0,1 8

Sumber: Blangko Laporan SLPPHT 2021

Berdasar pada tabel hasil pengamatan OPT diatas, diketahui bahwa dari minggu ke minggu hasil pengamatan menemukan adanya peningkatan terhadap penemuan terkait intensitas serangan OPT, seperti hama tikus, yang pada minggu ke 12 mendapat angka paling tinggi dari minggu minggu sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa, dengan banyaknya tikus yang ditemukan ini, artinya perangkat alami yang dibuat oleh petani pengamat beserta petani peserta bekerja dengan baik, buktinya dengan banyaknya tikus yang terhitung dalam perangkat yang dipasang pada minggu terakhir saat mulai dekat panen, kemudian pada intensitas serangan hama penggerek batang (PB), mulai terlihat pada minggu pertengahan namun hingga minggu akhir, sudah tidak ada lagi hama penggerek batang ditemukan, hal ini juga merupakan bentuk efektifnya.

Musuh alami yang diberdayakan guna membasmi hama penggerek batang, dan untuk musuh alami sendiri, mengalami perkembangan dari minggu pertama belum ada sama sekali ditemukan musuh alami, hingga pada minggu-minggu berikutnya jumlah musuh alami mengalami perkembangan, jumlah penemuan musuh alami juga dipengaruhi oleh jumlah anakan atau batang padi yang dihitung, semakin banyak anakan yang dihitung, maka semakin banyak pula ditemukan musuh alami, musuh alami sendiri berguna dalam membasmi OPT, dimana OPT sendiri merupakan makanan dari musuh alami tersebut. Hasil pengamatan tidak hanya menemukan hasil yang positif terhadap OPT, namun juga sejalan dengan hasil panen, dimana hasil panen pada lahan Sopieng Indah yang menjadi sampel penelitian sebagai lokasi penerapan PHT lebih tinggi ketimbang lahan usaha tani lain yang belum diterapkannya sistem PHT disana, berikut tabel hasil pengamatan saat panennya;

Tabel 1.5 Perbandingan Hasil Pengamatan Saat Panen pada Lahan Penerapan PHT dan Non PHT

No	Parameter Pengamatan	Lahan Penerapan PPHT	Non Lahan PPHT
1	Varietas	Lokal	Lokal
2	Hasil Ubinan (2.50 m * 2.50m)	4 Kg	3,6 Kg
3	Produksi (kg/ha)	6,400	5,760

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Berdasar tabel 1.6 dapat terlihat bahwa penerapan PHT berpengaruh terhadap hasil panen, terbukti, pada lahan usaha tani dengan penerapan PHT memiliki hasil panen yang lebih besar yaitu sebesar 6,400 Kg per hektarnya, dibanding hasil panen pada lahan yang belum diterapkannya PHT dengan hasil panen sebesar 5,760 Kg per hektarnya.

Dari beberapa hasil pengamatan yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa, penerapan PHT memang berdampak positif secara langsung terutama terhadap petani, dimana selain dapat menghambat dan meminimalisir serangan OPT, dengan cara yang alami dan tentunya ramah lingkungan tanpa bergantung terhadap pestisida kimia, namun pada hasil panen juga berdampak positif, buktinya dengan tingginya hasil panen pada lahan yang diberlakukan penerapan PHT.

Dari rangkaian hasil positif yang diperoleh, kenyataannya pasca pelaksanaan program SLPPHT ini, muncul beberapa permasalahan dalam proses pemberdayaan yang diantaranya yaitu;

1. Masih rendahnya kesadaran dari para petani untuk menerapkan prinsip PHT di lahan usahatannya, meskipun telah mengikuti program SLPPHT, sehingga kerap kali dari para petani masih menggunakan cara lama dalam pemeliharaan tanaman padi dilahan usaha taninya yang sudah jelas akan berdampak buruk terhadap lingkungan.
2. Minimnya inisiatif dari para petani yang telah mengikuti program untuk berperan sebagai agen pemberdayaan, guna membagikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program kepada para petani lain.
3. Kurangnya bimbingan dari petugas POPT dan PPL wilayah binaan Nagari Muaro Bodi untuk menumbuhkan rasa inisiatif kepada para petani untuk menerapkan prinsip PHT dilahan usaha taninya juga menjadi faktor terhadap masalah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah salah satu tahap diantara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang ditetapkan sebagai batasan pembahasan penelitian yaitu “ Bagaimana Pemberdayaan Petani Melalui Program SLPPHT Padi di Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah menganalisa pemberdayaan petani melalui program SLPPHT Padi di Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten Sijunjung, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian agar bisa lebih baik kedepannya.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dibuat dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Andalas.
3. Bagi masyarakat, menambah wawasan dan bahan rujukan terkait pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan teori dibidang Administrasi Pembangunan, khususnya pada kajian pemberdayaan masyarakat khususnya, serta dapat menjadi rujukan pada penelitian berikutnya.

